



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA PD) TAHUN 2021

**KECAMATAN PANARUKAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Jln. Raya Panarukan No. 02 (0338) 672402

email : panarukankecamatan@gmail.com

PANARUKAN 68351



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR :188/2.11 /P/004.2/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

A.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2011-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Dinas Sosial;
 9. Dinas Tenaga Kerja;
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Dinas Ketahanan Pangan;
 12. Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 21. Dinas Perikanan;
 22. Dinas Pariwisata;
 23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 25. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 28. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 29. Inspektorat;
 30. Sekretariat Daerah;
 31. Sekretariat DPRD;
 32. Kecamatan Banyuglugur;
 33. Kecamatan Jatibanteng;
 34. Kecamatan Sumbermalang;
 35. Kecamatan Besuki;
 36. Kecamatan Suboh;
 37. Kecamatan Mlandingan;

38. Kecamatan Bungatan;
39. Kecamatan Kendit;
40. Kecamatan Panarukan;
41. Kecamatan Situbondo;
42. Kecamatan Panji;
43. Kecamatan Mangaran;
44. Kecamatan Kapongan;
45. Kecamatan Arjasa;
46. Kecamatan Asembagus;
47. Kecamatan Jangkar;
48. Kecamatan Banyuputih.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 AUG 2021

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah V di Jember;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
 5. Sdr. Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo;
 6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Perubahan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panarukan Tahun 2020 tidak terlepas dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Panarukan 2016 -2021.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2021 sampai triwulan II, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Kecamatan Panarukan, dana indikatif beserta sumbernya serta perakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan Perubahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Panarukan Tahun Anggaran 2021. Melalui Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Demikian semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Panarukan, 26 Agustus 2021



SAIFUL BARI, S.Sos
Pembina
NIP. 196806301988111002



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1 Evaluasi Terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Program dan Kegiatan	1
BAB IV : PENUTUP	29



LAMPIRAN

NO	LAMPIRAN
1.	FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TRIWULAN II TAHUN 2021
2	REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

**BABI****PENDAHULUAN****1.1****LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan : dan /atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rancangan perubahan RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD serta keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Situbondo, tema pembangunan pada rancangan perubahan RKPD pada tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Kesehatan, Pariwisata dan Ekonomi berbasis Sektor Unggulan”**. Dengan prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Penguatan produktifitas ekonomi lokal pada sektor unggulan dan pariwisata berbasis kolaboratif antar aktor dan sektor;



2. Penyiapan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi;
3. Penguatan layanan kesehatan dan mekanisme distribusi bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;
4. Inovasi teknologi dalam rangka percepatan layanan publik, penyederhanaan perizinan dan manajemen pemerintahan.

Berdasarkan Tema Rancangan Perubahan RKPD pada Tahun 2021, maka Kecamatan Panarukan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Organisasi Perangkat Daerah adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah) berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panarukan, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Perangkat Daerah Kecamatan Panarukan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi Kepala Daerah dan Program Kecamatan Panarukan, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Perubahan Renja PD merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam Perubahan KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021. Selain itu, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.



Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengikuti Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Resntra PD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari OPD, evaluasi pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan RENJA PD yang dilanjutkan dengan Perubahan RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Perubahan RKPD dan Perubahan RENJA PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo tahun 2008 –2028;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015;
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 Tentang kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Situbondo
15. Peraturan Menteri dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah;



16. Surat Edaran bersama Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 270/M.PPN/11/2012 ; SE -33/MK.02/2012 ; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP/PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

1.3. Maksud dan Tujuan

MAKSUD :

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Kecamatan Panarukan adalah menetapkan dokumen perubahan perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Panarukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama sampai dengan Triwulan II tahun 2021;

TUJUAN :

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kecamatan Panarukan adalah guna merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Panarukan tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Panarukan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja



Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten /kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan sampai dengan Triwulan II selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD pada tahun Triwulan I.

2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap pencapaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing PD serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD



Berisikan mengenai:

1. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

- Jumlah Program dan Jumlah kegiatan,
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ,
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya dan Matriks Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut

**BAB II****EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN****2.1****EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN II**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panarukan adalah Perubahan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat daerah Kecamatan Panarukan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Kecamatan Panarukan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Panarukan selama tahun 2021 sampai Triwulan II dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

**Evaluasi Program sampai Triwulan II Tahun 2020**

Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Panarukan dengan 5 program dan 12 kegiatan. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 disediakan plafon anggaran Rp. **2.951.152.351,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)**. Perubahan Anggaran Refocusing Tahun 2021 sebesar Rp. **2.584.295.646,- (Dua Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)** dan pada Perubahan Anggaran RKPD Tahun 2021 sebesar (**Dua Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)**. Dari plafon anggaran tersebut sampai Triwulan II tahun 2021 terealisasi sebesar **Rp. 934.483.419 ,- (Sembilan ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan belas rupiah)** atau mencapai **31,37 %**.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 berdasarkan Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II, yang mana berimbas pada pelaksanaan program/kegiatan tidak memenuhi target yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.1.2

Tabel 2.1.1

Program/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja

Sesuai dengan Program / Kegiatan di DPA tahun 2021 sampai triwulan II, berdasarkan **Hasil**

Capaian Kinerja program terdapat 3 Program yang tidak memenuhi target 50 %,

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	44,63 %	44,63 %
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	33,33%	33,33%
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	40%	40%



Sesuai dengan Program / Kegiatan di DPA tahun 2021 sampai triwulan II, berdasarkan **Hasil Capaian Kinerja Keuangan** terdapat 5 Program yang memenuhi target 50%, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.1.1
Program/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Keuangan

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.506.787.912	830.352.219	33,12 %
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.	162.053.230	53.641.100	33,10 %
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	27.334.580	8.960.000	32,78 %
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	69.998.975	4.745.000	6,78 %
5	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	184.977.654	36.784.400	19,89 %

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

Sesuai dengan Program / Kegiatan di DPA tahun 2021 sampai triwulan II, berdasarkan **Hasil Capaian Kinerja program** terdapat 2 Program yang memenuhi target 50 %,

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	53,89 %	53,89 %
2	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	55,17%	55,17%



2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Panarukan Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari 5 program, tidak terdapat program yang melebihi target kinerja keuangan

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terepenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Tercapainya dan tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo disebabkan oleh :

- Realisasi Program/Kegiatan pada Kecamatan Panarukan Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sampai dengan triwulan II yang memenuhi target kinerja rata-rata 50 % sebanyak 2 program dan yang tidak memenuhi target kinerja keuangan sebanyak 5 program disebabkan realisasi anggaran tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan target yang telah ditetapkan dan disebabkan pula dengan adanya refocusing anggaran.
- Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja keuangan adalah pada sebanyak 3 Program disebabkan antara lain :
 1. Pelaksanaan Kegiatan pada program dimaksud dianggarkan dan dilaksanakan pada triwulan 3 dan dan triwulan dan 4 Tahun 2020.
 2. Kurangnya koordinasi antara Tim Pengelola Keuangan
 3. Keterbatasan SDM Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan
 4. Adanya Pandemi COVID-19

2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan Panarukan

Implikasi yang timbul atas capaian program/kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Panarukan antara lain adalah :

- a. Kecamatan Panarukan dituntut untuk tetap melaksanakan fungsi dasarnya, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat kecamatan.
- b. Aparat Kecamatan dituntut bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;



- c. Pola kerja di Kecamatan Panarukan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif
- d. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- e. Sarana ruangan pelayanan yang representatif.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil Kecamatan Panarukan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan Kecamatan Panarukan secara konsisten mengacu pada Renstra Perangkat Daerah yang telah tersusun selama lima tahun anggaran kecuali ada kegiatan atau program yang sangat urgent dan perlu dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, dan proses perencanaan ini dituangkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Perangkat Daerah tiap tahun anggaran. Proses penyusunan perencanaan program/kegiatan tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Panarukan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
- b. Proses penganggaran program/kegiatan Perangkat Daerah diupayakan efisien, efektif, berpedoman pada regulasi-regulasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sehingga kebutuhan anggaran untuk Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Panarukan dalam pelaksanaannya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang menggunakan Teknologi Informasi Komputer (TIK) kepada masyarakat.



2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Desa.
3. Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
5. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

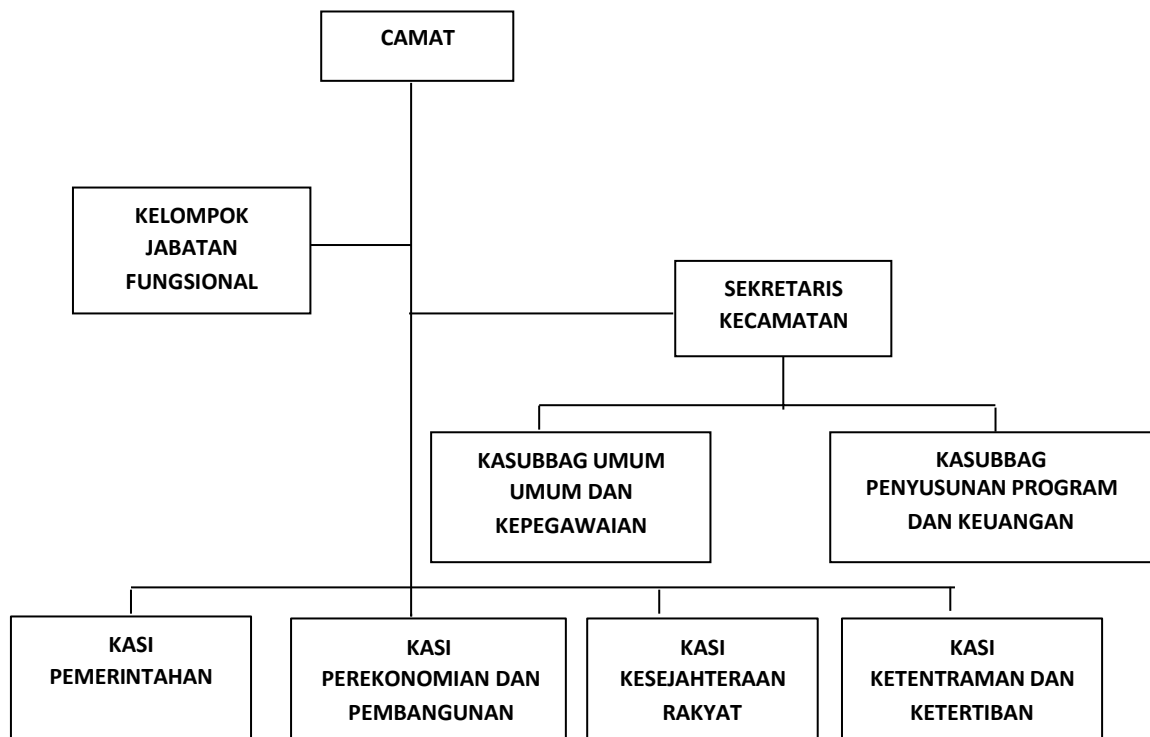
Kecamatan Panarukan merupakan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 Tentang kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan mempunyai dan susunan organisasi :

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.**
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.**



Struktur Organisasi Kecamatan Panarukan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :



Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan serta Seksi – seksi Kantor Kecamatan Panarukan mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda :

1. **Camat** mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan



Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada) dibantu oleh perangkat kecamatan Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

2. **Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

2.1 **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;
- b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- d. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan ; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.2 **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. penyiapan rencana kegiatan;
- c. penyiapan rencana kebutuhan kantor;
- d. penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pembuatan laporan keuangan;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) **Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
- b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa ;
- c. pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;
- d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;
- e. pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

(3) **Seksi Perekonomian dan Pembangunan** mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :



- a. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;
- b. penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
- c. pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
- d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ;
- e. penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;
- f. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- g. pembinaan pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- i. penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- j. penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

(4) **Seksi Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;



- d. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi

- a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- c. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.



- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM Kecamatan Panarukan sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN PANARUKAN

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi



dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Situbondo. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Isu adanya tuntutan pelayanan administrasi kecamatan berbasis Teknologi.
2. Isu Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa.
3. Isu adanya perkembangan IPTEK yang pesat tidak selaras dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Isu adanya Pengembangan Destinasi wisata Baru yang integratif dengan Potensi masing – masing Desa untuk mendukung Tahun Kunjungan Wisata 2019.
5. Isu tentang penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Layak Anak dan Kecamatan Peduli Disabilitas.
6. Isu adanya Tuntutan Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, untuk meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan Penunjang Ekonomi Rakyat.
7. Isu tentang penanganan persampahan dan ODF
8. Isu adanya Peningkatan Pelestarian lingkungan Hidup dan Penanggulangan bencana Alam
9. Isu tentang Peningkatan Peran disabilitas dan Anak pada Rencana Pembangunan
10. Isu Rendahnya keterwakilan Perempuan pada pengambilan Keputusan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Situbondo yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panarukan, sebagai berikut :

1. Letak Kecamatan Panarukan yang berada di jalan Pantura sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih mudah.
2. Sarana infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas umum tersedia dalam kondisi baik sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik



3. Pelaksanaan Tugas dalam rangka koordinasi dengan instansi/dinas terkait maupun vertikal dapat dilakukan dengan baik.
 - a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima dan tuntutan masyarakat yang menginginkan akses pelayanan publik yang mudah transparan dan nyaman melalui penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK)
 - b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa.
 - c. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak selaras dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
 - d. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
 - e. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - f. Rendahnya keterwakilan Perempuan pada pengambilan Keputusan
 - g. Pengembangan Destinasi wisata Baru yang integratif dengan Potensi masing – masing Desa
 - h. Meningkatkan Peran disabilitas dan Anak pada Rencana Pembangunan
 - i. Adanya tuntutan Pembangunan, Pelayanan Kecamatan Ramah Anak dan Fasilitas untuk disabilitas.
 - j. Tuntutan Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, untuk meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan Penunjang Ekonomi Rakyat
 - k. Meningkatkan Pelestarian lingkungan Hidup dan Penanggulangan bencana Alam

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.3.1 Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi PD

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo saat ini dilakukan dengan diawali



dari musyawarah pembangunan desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Dengan dilakukannya proses tersebut diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panarukan, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan Panarukan yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur serta stakeholders sebagai berikut :

- a. Minimalnya tenaga fungsional umum (staf) di masing - masing seksi dan adanya kekosongan pada jabatan struktural (kasi),
- b. Rendahnya SDM Aparatur Kecamatan di bidang Informasi Teknologi (IT) dan mengoperasikan komputer,
- c. Adanya tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan,
- d. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana gedung pelayanan serta Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang ada di Kantor Kecamatan Panarukan sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal,
- e. Kurangnya keterlibatan Perempuan, disabilitas dan Anak pada pengambilan Keputusan di Musyawarah perencanaan Pembangunan,
- f. Kurangnya Partisipasi Desa untuk berinovasi membuat destinasi wisata baru yang integratif dengan potensi masing – masing Desa dan BUMDes untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat.

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, Seperti SPM Dan MDGS (*Millenium Development Goals*)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dalam rangka pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Kecamatan Panarukan , ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yakni :

1. Nilai Survei IKM Kecamatan Panarukan



2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
3. Persentase Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan baik

Diperlukan sebuah perencanaan program yang komprehensif dan sustainable / berkelanjutan terkait peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah baik dari sisi kemampuan teknoratis, kedisiplinan, kepekaan/responsiveness, serta keberanian dan semangat untuk melakukan improvisasi dan inovasi agar semua kegiatan yang dilaksanakan efektif, efisien, tepat sasaran dan partisipasif sehingga mencapai ekspektasi capaian kinerja yang diharapkan.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

Penyusunan Renstra PD dan Renja PD Kecamatan Panarukan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung pencapaian MDGs dan dilengkapi dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan. Pemerintah Provinsi telah mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja PD dan RKA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian MDGs. Melalui cara ini pencapaian target MDGs tingkat nasional dapat diwujudkan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGS) adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
2. Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

2.3.3 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PD

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Panarukan menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Tuntutan implementasi peningkatan pelayanan kecamatan kepada masyarakat merupakan peluang pada Kecamatan Panarukan untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan prima kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan



- cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
2. Tuntutan masyarakat yang menginginkan akses pelayanan publik yang mudah transparan dan nyaman melalui penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK)

Sedangkan Peluang yang dihadapi Kecamatan Panarukan sebagai berikut :

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah tertata dengan baik.
- 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Panarukan
- 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas – luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- 4) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- 5) Ditetapkannya RPJPM Kabupaten Situbondo merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo

Letak Geografis Kantor Kecamatan Panarukan yang merupakan Jalur Pantura menuju Pulau Bali sehingga memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan dalam mengakses sarana Internet guna peningkatan pelayanan Pelayanan Publik.

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal maupun eksternal dengan PD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia Kecamatan Panarukan serta membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Panarukan. Ke depan diharapkan Kecamatan Panarukan mampu menyediakan ruangan PATEN yang lebih representatif.



2.3.4 FORMULASI ISU-ISU PENTING BERUPA REKOMENDASI DAN CATATAN YANG STRATEGIS UNTUK DITINDAKLANJUTI DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN YANG DIRENCANAKAN

Perencanaan Pembangunan Daerah perlu didukung dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga BAPPEDA hendaknya konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dirumuskan isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Panarukan sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni :

- 1) Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang menggunakan Teknologi Informasi Komputer (TIK) kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Desa.
- 3) Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM
- 4) Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
- 5) Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.
- 6) Melibatkan keterwakilan perempuan, Disabilitas dan Anak pada Musyawarah rencana Pembangunan Kecamatan.
- 7) Pelayanan dan Pembangunan yang ramah anak dan disabilitas.



- 8) Pelestarian lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan peran FKKS dan masyarakat.
- 9) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan UMKM sebagai pengungkit ekonomi rakyat.
- 10) Mengoptimalkan Tim Tagana Kecamatan Dan Desa pada Penanggulangan Bencana.
- 11) Memotivasi Desa yang bersinergi dengan BUMDES untuk berinovasi menciptakan Destinasi wisata baru yang integratif dengan Potensi masing- masing Desa.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Panarukan maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penataan Organisasi
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panarukan Tahun 2021 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Kecamatan Panarukan 2016 - 2021 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Panarukan untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra PD (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panarukan selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2021 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Panarukan Tahun 2021 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Panarukan pada periode Tahun 2021. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Panarukan yang pelaksanaannya



bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Panarukan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Panarukan. Perubahan Renja PD juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Perubahan Renja PD juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2021, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Panarukan.

Panarukan, 26 Agustus 2021



PLT. KAMAT PANARUKAN

SARFUL BARI, S.Sos

Pembina

NIP. 196806301988111002

**Formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo
Triwulan 2 Tahun 2021**

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PDTahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15
	Meningkatnya penatausahaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	4.661.662.631	00.00%	2.496.594.933	100.00%	658.189.565	37.50%	56.264.050	80.93.99	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3750%	886.616.969	137.50%	3.38321902	13750%	72.58%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	56	Dok	132,740,000	46	60,322,516	10	9,817,840	-	-	2	6,870,000	-	-	-	2	6,870,000	48	67,192,516	85.70%	50.62%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA dan RENJA yang disusun	15	Dok	30,000,000	12	18,459,000	3	5,490,000	0	-	1	5,100,000				1	5,100,000	13	23,559,000	86.67%	78.53%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6	Dok	14,500,000	5	3,743,250	1	2,535,000	0	-	0	-				-	-	5	3,743,250	83.33%	25.82%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	6	Dok	14,500,000	5	3,743,250	1	2,535,000	0	-	0	-				-	-	5	3,743,250	83.33%	25.82%		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	6	Dok	14,500,000	5	3,743,250	1	2,535,000	0	-	0	-				-	-	5	3,743,250	83.33%	25.82%		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	6	Dok	14,500,000	5	3,743,250	1	2,535,000	0	-	0	-				-	-	5	3,743,250	83.33%	25.82%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	17	Dok	44,740,000	14	26,890,516	3	4,187,840	0	-	1	1,770,000				1	1,770,000	15	28,660,516	88.24%	64.06%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja akhir tahun yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-				-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	135		473,334,000	111	182,935,991	24	107,499,950	0	-	4	44,055,000				4	44,055,000	115	226,990,991	85.19%	47.96%		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayar	0	0	0	0	0	0	0			0	-				-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN pengelola administrasi keuangan yang	57	Org	305,914,000	46	46,231,291	11	79,500,000	0	-	10	31,200,000				10	31,200,000	56	77,431,291	98.25%	25.31%		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen ASET Barang Milik Daerah yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-				-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun	6	Dok	16,500,000	5	11,704,700	1	2,079,950	0	-	1	2,055,000				1	2,055,000	6	13,759,700	100.00%	83.39%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran yang disusun	72	Dok	150,920,000	60	125,000,000	12	25,920,000	0	-	4	10,800,000				4	10,800,000	64	135,800,000	88.89%	89.98%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	112		25,200,000	95	19,200,000	17	5,775,750	-	-	15	5,096,250				15	5,096,250	110	24,296,250	98.21%	96.41%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	112	Stel	25,200,000	95	19,200,000	17	5,775,750			15	5,096,250				15	5,096,250	110	24,296,250	98.21%	96.41%		

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab								
								I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12			15 = 13/5 x 100 %							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	7	Rp	658,867,400	7	Rp	385,474,851	7	Rp	179,990,025	2	Rp	8,424,240	4	Rp	39,864,885			48,289,125	7	Rp	433,763,976	100.00%	65.83%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang disediakan	36	Jenis	38,200,000	28	Rp	32,068,261	8	Rp	9,659,725		Rp	0		Rp	167,500			-	167,500	28	Rp	32,235,761	77.78%	84.39%		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							-	-			0.00%	0.00%			
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	6	Jenis	90,500,000	5	Rp	25,635,000	1	Rp	5,262,500		Rp	0						-	-	5	Rp	25,635,000	83.33%	28.33%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	139	Jenis	79,718,000	104	Rp	51,931,450	35	Rp	18,009,600	8	Rp	2,514,240	35	Rp	8,680,740			43	Rp	11,94,980	147	Rp	63,126,430	105.76%	79.9%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	26	Jenis	60,432,000	21	Rp	39,107,640	5	Rp	11,453,300		Rp	5		3,021,345			5	Rp	3,021,345	26	Rp	42,128,985	100.00%	69.7%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Jenis	33,660,000	11	Rp	16,980,000	1	Rp	3,000,000		Rp	1		1,500,000			1	Rp	1,500,000	12	Rp	18,480,000	100.00%	54.90%		
		Fasilitas Kunjungan Umum	Jumlah Jenis konsumsi tamu yang disediakan	42	Jenis	57,744,900	35	Rp	45,000,000	7	Rp	8,744,900		Rp	0		5,753,300				-	5,753,300	35	Rp	50,753,300	83.33%	86.89%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	129	Koordinasi	298,612,500	67	Rp	174,752,500	62	Rp	123,860,000	8	Rp	5,910,000	34	Rp	21,320,000			42	Rp	27,230,000	109	Rp	20,982,500	84.50%	67.64%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	3		810,418,931	3	Rp	389,581,431	1	Rp	4,066,000		Rp	0						-	-	3	Rp	389,581,431	100.00%	48.07%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	2	Unit	369,000,000	2	Rp	54,068,000	-	Rp	-		Rp	0						-	-	2	Rp	54,068,000	100.00%	14.65%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	9	Jenis	185,400,000	9	Rp	83,560,500	-	Rp	-		Rp	0						-	-	9	Rp	83,560,500	100.00%	45.07%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	30	Jenis	256,018,931	29	Rp	251,952,931	1	Rp	4,066,000		Rp	0						-	-	29	Rp	251,952,931	96.67%	98.41%		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							-	-			0.00%	0.00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung yang dibeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							-	-			0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Jenis	670,705,450		Rp	479,243,837		Rp	165,622,750	2	Rp	28,536,810	4	Rp	40,722,710			6	Rp	69,259,520	6	Rp	548,503,357	75.00%	81.78%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	3405	Surat	12,898,950	2705	Rp	9,330,000	700	Rp	3,568,950		Rp	368		1,98,500				368	Rp	1,98,500	3,073	Rp	10,528,500	90.25%	81.62%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	276	Rekening	136,800,000	240	Rp	132,691,900	36	Rp	49,186,200	9	Rp	12,536,810	9	Rp	14,254,710			18	Rp	26,791,520	258	Rp	159,482,710	93.48%	116.58%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan /perlengkapan Kantor yang disediakan	3	Jenis	8,006,500	0	Rp	0	3	Rp	8,006,500		Rp	1		60,000			1	Rp	60,000	1	Rp	60,000	33.33%	0.75%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang dibayar	52	Orang	513,000,000	44	Rp	337,222,647	8	Rp	104,861,100	8	Rp	16,000,000		Rp	25,209,500			8	Rp	41,209,500	52	Rp	378,432,447	100.00%	73.77%	

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
								I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12			15 = 13/5 x 100 %			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	8	Jenis	1.827.698.000	4	957.136.807	4	155.48.000	1	19.303.000	2	45.051.500					3	64.354.500	7	102.491.307	8750%	55.89%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	76	Kendaraan	546.645.600	62	427.337.600	14	119.308.000	14	19.303.000	0	21.300.500					14	40.603.500	76	467.941.000	100.00%	85.60%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	0	0	0	0	0	0	0			0	-									0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	16	Mebel	51.000.000	12	27.209.500	4	8.445.000			0	-							12	27.209.500	75.00%	53.35%	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0			0	-									0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / direhab	2	Gedung	1.515.000.000	1	435.763.207	1	15.939.000			1	558.000					1	558.000	2	436.321.207	100.00%	37.89%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	19	Jenis	78.552.500	16	66.826.500	3	11.726.000			2	3.890.000					2	3.890.000	18	70.716.500	94.74%	90.02%	
		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen IKM yang disusun	6	-	62.698.750	5	22.699.500	1	19.999.250			0	-							5	22.699.500	83.33%	36.20%	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen IKM yang disusun	6	Dokumen	62.698.750	5	22.699.500	1	19.999.250			0	-							5	22.699.500	83.33%	36.20%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					89.37%	60.35%			
Predikat Kinerja																					T	R			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		339.031.530	100%	176.978.300	100%	162.053.230			53.89%	53.641.000					1	53.641.000	153.89%	230.619.400	153.89%	68.02%		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	18	ekomenda	110.447.350	5	46.706.000	13	63.741.350			4	16.564.100					4	16.564.100	9	63.270.100	50.00%	57.29%		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	18	ekomenda	110.447.350	5	46.706.000	13	63.741.350			4	16.564.100					4	16.564.100	9	63.270.100	50.00%	57.29%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	2.231	Pemohon	228.584.180	1.231	130.272.300	1.000	98.311.880			770	37.077.000					770	37.077.000	2.000	167.349.300	89.69%	73.21%		

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD <u>sampai dengan</u> Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab	
										I		II		III		IV									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15	
		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	2231	Pemohor	228.584,80	1231	130.272,300	1000	98.311,880			770	37.077,000					770	37.077,000	2,00	167,349,300	89,69%	73,21%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					69,85%	65,25%			
Predikat Kinerja																					R	R			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%		74,310,980	00,00%	46,976,400	00,00%	27,334,580			33,33%	8,960,000					0	8,960,000	133,33%	55,936,400	133,33%	75,27%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	24	ekomenda	74,310,980	6	46,976,400	18	27,334,580			6	8,960,000					6	8,960,000	12	55,936,400	50,00%	75,27%		
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	24	ekomenda	74,310,980	6	46,976,400	18	27,334,580			6	8,960,000					6	8,960,000	12	55,936,400	50,00%	75,27%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					133,33%	75,27%			
Predikat Kinerja																					T	R			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	00,00%		69,998,975	0,00%	-	00,00%	69,998,975			40,00%	4,745,000					2	4,745,000	40,00%	4,745,000	40%	6,78%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang	5		69,998,975	-	-	5	69,998,975			2	4,745,000					2	4,745,000	2	4,745,000	40,00%	6,78%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	5	Koordinasi	69,998,975	-	-	5	69,998,975			2	4,745,000					2	4,745,000	2	4,745,000	40,00%	6,78%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					40,00%	6,78%			
Predikat Kinerja																					SR	SR			

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab	
					6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	345.929,54	100%	160.951.500	100%	184.977,654	-	55,7%	36.784,400	-	-	-	-	16	36.784,400	55,7%	197.735,900	155,17%	57,6%		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42 ekomenda	345.929,154	13	160.951.500	29	184.977,654	-	16	36.784,400	-	-	-	-	16	36.784,400	29	197.735,900	69,05%	57,6%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang ketenteraman dan ketertiban umum	8 ekomenda	137.848,454	4	60.834,000	4	77,04,454	-	2	10.663,400	-	-	-	-	2	10.663,400	6	71.497,400	75,00%	51,87%			
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan perekonomian pembangunan yang ditindaklanjuti	34 ekomenda	208.080,700	9	100.117,500	25	107.963,200	-	14	26.121,000	-	-	-	-	14	26.121,000	23	126.238,500	67,65%	60,67%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					7,32%	54,51%		
Predikat Kinerja																					S	R		
1	Meningkatnya penatausahaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tercapainya pelayanan Administrasi perkantoran	100%	2.116.199,298	00,00%	1.215.989,391	100,00%	384.703,500	18,76%	72.174,346	9,82%	76.230,888	2,96%	84.476,906	36,74%	141.321,660	97,27%	374.203,800	98,64%	1.590.93,91	98,64%	73,41%	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	3000 surat	12.287,000	1.998	6.294,000	608	3.040,000	247	1.350,000	112	1.350,000	175	339,000	175	-	707	3.039,000	2.705	9.333,000	90,17%	75,96%		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan setahun	288 rekening	136.800,000	192	87.407,050	48	46.800,000	12	6.215,960	12	15.079,960	12	12.770,560	12	11.899,660	48	45.284,140	240	132.691,90	83,33%	97,00%		
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	74 stnk	39.000,000	48	9.027,700	12	4.150,000	0	-	2	489,000	4	1.974,100	12	2.463,100	60	11.490,800	81,08%	29,46%				

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6			7		8		9		10			11		12 = 8+9+10+11			13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	15 = 13/5 x 100 %	15											
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengeloda Keuangan yang disediakan jasa administrasi keuangan	53 orang	455,914,000	36	153,616,000	12	84,660,000	10	11,820,000	0	17,530,000	0	17,765,000	0	30,560,000	10	77,675,000	46	231,291,000	86.79%	50.73%		
		Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah teraga kebersihan dan keamanan yang disediakan	54 orang	513,300,000	36	221,141,775	8	16,328,500	8	8,464,636	0	25,545,115	0	27,107,785	0	44,963,336	8	116,080,872	44	337,222,647	81.48%	65.70%		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	116 jenis	79,718,000	69	36,932,050	32	15,000,000	22	4,965,700	2	2,232,100	8	2,937,200	3	4,864,400	35	14,999,400	104	51,931,450	89.66%	65.14%		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30 jenis	60,432,000	17	27,393,250	4	11,730,000	3	2,082,500	0	1,065,700		3,496,700	0	5,069,464	4	11,714,364	21	39,107,614	70.00%	64.7%		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik yang disediakan	34 jenis	38,200,000	18	18,200,000	9	13,875,000	5	2,379,000	0	685,000	4	6,048,261		4,756,000	10	13,868,261	28	32,068,261	82.35%	83.95%		
		Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang	18 jenis	33,660,000	10	13,860,000	1	3,120,000	1	780,000	0	780,000	0	780,000	0	780,000	1	3,120,000	11	16,980,000	61.11%	50.45%		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan jenis makanan dan minuman rapat yang disediakan	13560 peserta	117,050,000	6,155	44,143,066	690	23,320,000	90	3,677,050	210	4,726,013	390	4,912,400	30	9,964,700	720	23,280,163	6,875	67,423,229	50.70%	57.60%		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	101 Orang	141,720,000	53	102,450,000	24	58,680,000	3	16,439,500	10	6,720,000	1	8,320,000		27,200,000	25	58,679,500	78	161,329,500	77.23%	157.16%		
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (PDH) yang disediakan	126 Pegawai	25,200,000	79	15,200,000	16	4,000,000	16	4,000,000	0	-	0	-	0	-	16	4,000,000	95	19,200,000	75.40%	76.19%		
		Pengadaan pakaian dinas Kemeja Putih	Jumlah Pakaian Dinas (Kemeja Putih) yang disediakan	48 Pegawai	12,600,000	21	3,150,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	21	3,150,000	43.75%	25.00%		
		Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari - hari tertentu yang disediakan	48 Pegawai	12,600,000	21	3,800,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	21	3,800,000	43.75%	30.16%		
		Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari besar keagamaan yang dilaksanakan	3360 peserta	240,000,000	1500	98,248,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1500	98,248,000	44.64%	40.94%		
		Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari besar Nasional yang dilaksanakan	5280 peserta	240,000,000	1075	67,045,500	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1075	67,045,500	20.36%	27.94%		

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PDTahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab	
										I		II		III		IV									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15	
		Dukungan Penyelenggaraan Seribu Hadrah	Jumlah kegiatan seribu hadrah yang diselenggarakan	600	peserta	40,800,000	540	34,554,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	34,554,000	90.00%	84.69%		
		Dukungan Pelaksanaan Harjakasi	Jumlah kegiatan peringatan harjakasi yang dilaksanakan	10	kegiatan	75,000,000	6	60,650,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	60,650,000	60.00%	80.87%		
		Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah dokumen laporan penggunaan aplikasi	60	dokumen	316,800,000	48	226,770,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	212,677,000	80.00%	67.3%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	81.99%	64.78%							
Predikat Kinerja																	T	R							
2	Meningkatnya penatausahaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan administrasi perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tercapainya sarana dan prasarana aparatur	100%		2,080,099,000	100.00%	151979457	100.00%	2790,000	30.77%	83,664,500	7.9%	46,742,500	21.46%	58,353,000	98.8%	82,733,07	99.85%	27,493,07	99.92%	1,423,472,528	99.92%	68.43%	
		Pembangunan gedung kantor	jumlah Pembangunan gedung kantor	3	GEDUNG	555,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	0.00%		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	9	JENIS	90,500,000	5	25,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25,635,000	55.56%	28.33%		
		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli	3	jenis	12,800,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	0.00%		
		Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	8	kendaraan	369,000,000	0	-	2	54,068,000	1	32,068,000	0	0	0	22000000	0	0	2	54,068,000	2	54,068,000	25.00%	4.65%	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	39	jenis	375,000,000	25	97372,750	1	54,900,000	1	19,900,000	0	0	0	0	3	346808	4	54,580,181	29	251,952,931	74.36%	67.9%	
		Pengadaan meubeler	Jumlah dan jenis meubeler yang dibeli	14	jenis	185,400,000	6	68,980,500	3	14,580,000	2	12,600,000	1,980,000	0	0	0	0	3	14,580,000	9	83,560,500	64.29%	45.07%		
		Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang mendapatkan pemeliharaan	6	rumah	85,000,000	4	15,000,000	1	5,000,000	0	-	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5	20,000,000	83.33%	23.53%		
		Pemeliharaan Rutin gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	6	gedung	92,610,000	4	35,110,000	1	7,500,000	0	-	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	5	42,610,000	83.33%	46.0%		

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab		
										I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15		
		Peeliharaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan pemeliharaan secara rutin/berkala	76	kendaraan	785,034,000	48	299,04,000	14	116,92,000	12	14,597,000	0	27,935,000	2	296,980,000	0	446,028,900	14	116,832,890	62	415,846,890	81.58%	52.97%		
		Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	24	jenis	102,400,000	11	51,344,500	4	15,500,000	3	4,499,500	0	4,327,500	0	665,500	0	0	4	15,482,000	15	66,826,500	62.50%	65.26%		
		Pemeliharaan berkala mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara	18	jenis	51,000,000	8	23,759,500	3	3,450,000	0	-	0	-	0	0	0	4	3,450,000	4	3,450,000	12	27,209,500	66.67%	53.35%	
		Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang direhabilitasi sedang / berat gedung kantor	6	gedung	1,115,150,000	4	435,763,207	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	1	435,763,207	6.67%	6.5%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					51.11%	33.57%				
Predikat Kinerja																					SR	SR				
3	Meningkatnya penatausahaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan administrasi perkantoran	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen keuangan dan pelaporan kinerja yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%		144,196,000	100.00%	81,435,950	100.00%	21,356,850	37.95%	8,105,000	0.00%	0.00%	-	61.41%	13,115,000	99.36%	21,220,000	99.68%	102,655,950	99.68%	71.19%			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip, perjanjian kinerja yang disusun	6	dokumen	16,500,000	4	12,415,550	1	4,496,000	1	4,451,000	0	-	0	-	0	0	1	4,451,000	5	16,866,550	83.33%	102.22%		
		Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun	6	lporan	13,096,000	4	4,649,300	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-	-	4	4,649,300	66.67%	0.00%		
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun yang tersusun	6	laporan	16,500,000	4	9,686,700	1	2,080,000	1	2,018,000	0	0	0	-	0	0	1	2,018,000	5	11,704,700	83.33%	70.94%		
		Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA, RKAP dan DPPA yang tersusun	24	dokumen	58,000,000	16	7,195,000	4	7,800,000	-	-	0	0	4	-	0	777,850	4	7,778,500	20	14,973,500	83.33%	25.82%		
		Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	5	laporan	15,444,000	4	3,739,650	1	1,636,000	1	1,636,000	0	0	0	-	0	0	1	1,636,000	5	5,375,650	83.33%	32.58%		
		Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen IKM yang disusun	4	dokumrr	27,500,000	4	3,042,500	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-	-	4	3,042,500	16.67%	5.25%		

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab	
										I		II		III		IV									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15	
		Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	6	dokumr	5,000,000	4	8,331,000	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-	-	4	8,331,000	66,67%	55,54%		
		Penyusunan RENJA KECAMATAN	Jumlah dokumen Renja yang disusun	12	dokumr	5,000,000	8	9,628,250	2	5,344,850	-	0	0	2	-	0	533,650	2	5,336,500	10	4,964,750	83,33%	99,77%		
		Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen Profil Kecamatan	6	dokumr	62,700,000	4	22,748,000	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-	-	4	22,748,000	66,67%	36,28%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					70.37%	47.60%			
Predikat Kinerja																					S	SR			
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Pelaporan ADD Terbib Administrasi ,baik dan tepat waktu	100.00%		258,129,700	100.00%	82,489,000	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	50.00%	82,489,000	50.00%	31.96%		
		Penunjang Program ADD	mengelola keuangan desa dengan benar dan tepat waktu	32	desa	107,937,000	32	82,489,000	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-	-	32	82,489,000	100.00%	76.42%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00%	76.42%			
Predikat Kinerja																					ST	T			
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Program Peningkatan kapasitas kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100.00%		413,905,000	100.00%	-	100.00%	150,312,500	21.55%	32,387,957	8.56%	27,900,000	18.82%	28,282,500	40.82%	61,358,843	99.75%	49,929,300	99.87%	49,929,300	99.87%	36.22%	
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pemohon Pelayanan Perijinan dan Non perijinan yang diproses sesuai SOP	1500	pemohon	728,000,000	0	0	750	130,312,500	419	32,387,957	214	27,900,000	366	28,282,500	232	4170,843	1,231	130,272,300	1,231	130,272,300	82.07%	17.89%	
		Penyusunan IKM Kecamatan	Jumlah Laporan IKM yang disusun	2	dokumeb	50,000,000	0	0	1	20,000,000	-	0	0	0	-	0	19657000	1	19,657,000	1	19,657,000	50.00%	39.31%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					66.03%	28.60%			
Predikat Kinerja																					S	SR			

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6			7		8		9		10			11		12 = 8+9+10+11			13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15	
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	00.00%	1342.925250	100.00%	-	00.00%	254,940,460	39.64%	10,066,900	6.79%	42,793,500	7.72%	19,673,500	35.73%	91,006,600	99.88%	254,634,500	99.94%	254,634,500	99.94%	18.96%		
		Koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan desa	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan	48	ekomenda	440,000,000	0	0	5	46,930,000	3	26,499,000	10,311,000	0	-	9896000	5	46,706,000	5	46,706,000	10.42%	10.62%			
		Koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan di kecamatan dan desa	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang perekonomian dan pembangunan	48	ekomenda	980,000,000	0	0	9	100,96,950	3	30,468,500	2	7,888,000	8,763,000	3	52,998,000	9	100,117,500	9	100,117,500	18.75%	10.22%		
		Koordinasi, pembinaan, serta penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di kecamatan dan desa	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang kesejahteraan rakyat	48	ekomenda	620,000,000	0	0	6	46,978,910	3	15,974,000	2	4,965,000	10,910,500	0	15,269,000	6	46,976,400	6	46,976,400	12.50%	7.58%		
		Koordinasi, pembinaan, serta penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum di kecamatan dan desa	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang ketertarikan dan ketertiban umum	48	ekomenda	320,000,000	0	0	4	60,834,600	2	28,125,400	19,629,500	0	-	13079700	4	60,834,600	4	60,834,600	8.33%	19.01%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					12.50%	11.85%			
Predikat Kinerja																					SR	SR			
7	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase tercapainya Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	00.00%	573,961,400	100.00%	142,414,000	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	50.00%	142,414,100	50.00%	24.81%			
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan yang melaksanakan tata pemerintahan yang baik	48	desa	9,600,000	48	6,450,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	48	6,450,000	100.00%	67.91%			
		Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yg mengikuti lomba desa tingkat kecamatan	48	desa	35,462,000	48	29,037,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	48	29,037,000	100.00%	81.88%			
		Pembinaan Kamtibmas dan Limas	Jumlah desa yg rawan kriminal	48	desa	14,265,000	48	11,565,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	48	11,565,000	100.00%	81.07%			
		Pembinaan dan monitoring Administrasi PBB	Jumlah desa yang memungut PBB	48	desa	20,840,000	48	15,960,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	48	15,960,000	100.00%	76.58%			

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab	
										I		II		III		IV									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15	
		Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah desa yg melaksanakan kegiatan BBGM	48	desa	33,540,000	48	30,240,000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	48	30,240,000	100.00%	90.16%	
		Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.	400	peserta	36,344,000	400	25,889,100	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	400	25,889,100	100.00%	71.23%	
		Fasilitasi perencanaan pembangunan desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa	8	desa	30,000,000	8	13,200,000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	8	13,200,000	100.00%	44.00%	
		Fasilitasi Pelaksanaan Raskin	Jumlah desa yang melaksanakan program raskin Raskin	48	desa	16,866,000	48	10,073,000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	48	10,073,000	100.00%	59.72%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00%	7.48%			
Predikat Kinerja																					ST	S			
8	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Ormas dan PKK Desa yang Aktif dlm organisasi	00.00%		137,522,800	100.00%	-	-	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	50.00%	30,240,000	1.04%	90.16%	
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga dan organisasi kemasyarakata yang dibina	16	lembaga	13,033,800	16	13,200,000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	16	13,200,000	100.00%	44.00%	
		Pembinaan UMKM	Jumlah UMKM Kecamatan Panaru	8	umkm	30,000,000	8	27,949,800	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	8	27,949,800	100.00%	93.17%	
		Fasilitasi Kelompok Sadar Wisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang terbentuk	8	klp	30,000,000	8	29,790,000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	8	29,790,000	100.00%	99.30%	
		Peningkatan Pemberdayaan PKK	Jumlah TP-PKK Desa yang dibina / diberdayakan	32	TP_pkk desa	137,000,000	32	77,470,950	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	32	77,470,950	100.00%	56.55%	
		Fasilitasi Forum Layak Anak	Jumlah forum layak anak desa yang dibina	8	forum layak anak	35,000,000	8	17,917,300	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	8	17,917,300	100.00%	51.99%	
		Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif	Jumlah Pameran yang diikuti	4	pameran	75,000,000	4	19,548,950	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	4	19,548,950	100.00%	26.07%	
		Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Tanggap Darurat Bencana	180	peserta	40,000,000	180	39,575,000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	180	39,575,000	100.00%	98.94%	
		Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Desa yang melaksanakan Pokja Desa Sehat	32	Desa sehat	158,600,000	32	62,357,500	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	32	62,357,500	100.00%	39.32%	
		Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	Jumlah lingkungan bersih, indah dan tertib	4	lingkungan	256,400,000	4	73,269,300	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	4	173,269,300	100.00%	67.58%	

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD <u>sampai dengan</u> Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PDTahun berjalan (Tahun n-1 / 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung jawab																					
									I		II		III		IV																												
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		15 = 13/5 x 100 %		15																			
		Pelaksanaan TKPK Kecamatan	Jumlah Dokumen data AKP yang disusun	3	dokumen	34,20.000	3	28,459,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28,459,350	100.00%	83.41%																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00%	65.95%																					
Predikat Kinerja																					T	R																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM																			2,185,777,314	16.18%	353,662,753	51.61%	1,128,150,307	8.73%	190,785,906	17.83%	389,629,174	94.35%	2,062,228,140														
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S.D PROGRAM 13)																					92.45%	52.31%																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S.D PROGRAM 13)																					T	R																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):																																											

Panarukan, 2 Juli 2021

PIL. CAMAT PANARUKAN



SALFOL BARI, S.Sos, M.M

Pembina

NIP. 19680630 198811 1 002

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021**

KABUPATEN/KOTA : SITUBONDO
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANARUKAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI KEGIATAN		TARGET				ANGGARAN				KETERANGAN
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	APBD 2021		PERUBAHAN RKPD 2021		APBD 2021	REFOCUSING	PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12= 11-10	13
	KEWILAYAHAN/KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,506,787,912.00	2,309,039,747.00	2,309,039,747.00	0.00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								19,817,840.00	18,227,840.00	18,227,840.00	0.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang tersusun	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	4	dokumen	4	dokumen	2,535,000.00	2,235,000.00	2,235,000.00	0.00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1	dokumen	1	dokumen	5,490,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun Jumlah LPPD yang tersusun	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	3	Laporan	3	Laporan	4,187,840.00	4,187,840.00	4,187,840.00	0.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1	dokumen	1	dokumen	2,535,000.00	2,235,000.00	2,235,000.00	0.00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1	dokumen	1	dokumen	2,535,000.00	2,235,000.00	2,235,000.00	0.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1	dokumen	1	dokumen	2,535,000.00	2,235,000.00	2,235,000.00	0.00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,956,098,297.00	1,951,058,297.00	1,945,958,297.00	-5,100,000.00	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI KEGIATAN		TARGET				ANGGARAN				KETERANGAN
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	APBD 2021		PERUBAHAN RKPD 2021		APBD 2021	REFOCUSING	PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12= 11-10	13
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	16	orang	16	orang	1,848,598,347.00	1,848,598,347.00	1,848,598,347.00	0.00	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang terbayar	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	12	orang	12	orang	79,500,000.00	79,500,000.00	74,400,000.00	-5,100,000.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah dokumen laporan bulanan yang disusun	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	12	Laporan	12	Laporan	25,920,000.00	20,880,000.00	20,880,000.00	0.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1	Laporan	1	Laporan	2,079,950.00	2,079,950.00	2,079,950.00	0.00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,775,750.00	5,096,250.00	5,096,250.00	0.00	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	25	stel	25	stel	5,775,750.00	5,096,250.00	5,096,250.00	0.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								179,990,025.00	87,537,950.00	92,637,950.00	5,100,000.00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	4	Jenis	4	Jenis	9,659,725.00	3,851,440.00	3,851,440.00	0.00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan yang tersedia	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	3	Unit	3	Unit	5,262,500.00	0.00	0.00	0.00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	36	Jenis	36	Jenis	18,009,600.00	14,357,810.00	19,457,810.00	5,100,000.00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	4	Jenis	4	Jenis	11,453,300.00	5,243,800.00	5,243,800.00	0.00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1	jenis	1	jenis	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang hadir	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1000	orang	1000	orang	8,744,900.00	8,744,900.00	11,084,900.00	2,340,000.00	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI KEGIATAN		TARGET				ANGGARAN				KETERANGAN
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	APBD 2021		PERUBAHAN RKPD 2021		APBD 2021	REFOCUSING	PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12= 11-10	13
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah peserta	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1280	orang	1280	orang	123,860,000.00	52,340,000.00	50,000,000.00	-2,340,000.00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								165,622,750.00	150,052,400.00	150,052,400.00	0.00	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1000	surat	1000	surat	3,568,950.00	1,669,500.00	1,669,500.00	0.00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	48	rekening	48	rekening	49,186,200.00	46,606,200.00	46,606,200.00	0.00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang disewa	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	4	unit	4	unit	8,006,500.00	650,000.00	650,000.00	0.00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang dibayar	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	8	orang	8	orang	104,861,100.00	101,126,700.00	101,126,700.00	0.00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								155,418,000.00	92,077,240.00	92,077,240.00	0.00	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	3	Jenis	3	Jenis	8,445,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah STNK yang terbayar	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	15	unit	15	unit	119,308,000.00	79,505,750.00	79,505,750.00	0.00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah dinas yang terpelihara pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	2	unit	2	unit	15,939,000.00	3,215,490.00	3,215,490.00	0.00	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI KEGIATAN		TARGET				ANGGARAN				KETERANGAN
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	APBD 2021		PERUBAHAN RKPD 2021		APBD 2021	REFOCUSING	PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12= 11-10	13
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	2	unit	2	unit	11,726,000.00	8,856,000.00	8,856,000.00	0.00	
		Penataan Organisasi								19,999,250.00	4,989,770.00	4,989,770.00	0.00	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen IKM yang disusun	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1	laporan	1	laporan	19,999,250.00	4,989,770.00	4,989,770.00	0.00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4,066,000.00	0.00	0.00	0.00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	2	jenis	2	jenis	4,066,000.00	0.00	0.00	0.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								162,053,230.00	113,999,120.00	113,999,120.00	0.00	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								63,741,350.00	27,587,240.00	27,587,240.00	0.00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Pemerintah	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	24	rekomendasi	24	rekomendasi	63,741,350.00	27,587,240.00	27,587,240.00	0.00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								98,311,880.00	86,411,880.00	86,411,880.00	0.00	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemohon pelayanan perijinan dan non perijinan yang diproses sesuai SOP	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	1000	orang	1000	orang	98,311,880.00	86,411,880.00	86,411,880.00	0.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN								27,334,580.00	11,830,100.00	11,830,100.00	0.00	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								27,334,580.00	11,830,100.00	11,830,100.00	0.00	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI KEGIATAN		TARGET				ANGGARAN				KETERANGAN
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	APBD 2021		PERUBAHAN RKPD 2021		APBD 2021	REFOCUSING	PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12= 11-10	13
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	26	rekomendasi	26	rekomendasi	27,334,580.00	11,830,100.00	11,830,100.00	0.00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								69,998,975.00	69,998,975.00	69,998,975.00	0.00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan								69,998,975.00	69,998,975.00	69,998,975.00	0.00	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	26	rekomendasi	26	rekomendasi	69,998,975.00	69,998,975.00	69,998,975.00	0.00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								184,977,654.00	79,427,704.00	79,427,704.00	0.00	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								184,977,654.00	79,427,704.00	79,427,704.00	0.00	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindak lanjuti	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	15	rekomendasi	15	rekomendasi	77,014,454.00	32,801,354.00	32,801,354.00	0.00	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti bidang perekonomian dan pembangunan	Kec. Panarukan	Kec. Panarukan	6	rekomendasi	6	rekomendasi	107,963,200.00	46,626,350.00	46,626,350.00	0.00	
										2,951,152,351.00	2,584,295,646.00	2,584,295,646.00	-	